

Judul : Komisi IV DPR Nanya: Kenapa Jahe Ilegal Tak Dimusnahkan ?
Tanggal : Selasa, 23 Maret 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ketua Komisi IV DPR Sudin heran dengan Badan Karantina Pertanian yang tak kunjung memusnahkan jahe impor ilegal. Produk ini tidak memenuhi standar keselamatan pangan. Apalagi ada upaya tetap memaksakan agar jahe ilegal bisa masuk ke Indonesia.

Komisi IV DPR Nanya

Kenapa Jahe Ilegal Tak Dimusnahkan?

"PAK Mentan, saya sangat ter-singgung dengan kinerja anak buah Pak Menteri. Satu bulan lalu, saya sudah telepon Kepala Badan Karantina Pertanian (Ali Jami) untuk memusnahkan jahe yang campur tanah," tegas Sudin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sudin bilang, jahe yang masuk tidak memenuhi syarat ini jumlahnya cukup banyak dan tersebar di beberapa pelabuhan.

Sembilan kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan 4 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Jahe tersebut sangat berbahaya jika sampai masuk ke pasaran.

"Coba kita pikirkan, alangkah bahayanya jahe campur tanah masuk ke Indonesia. Sebelumnya saya tahu, cuma saya diam saja. Saya sudah mengecek sampai hari ini 9 dari 4 (kontainer) belum dimusnahkan juga," kesal Sudin.

Perilaku Badan Karantina Pertanian ini membuat politisi PDIP itu tidak tahu lagi harus ngomong bagaimana. Padahal, masalah jahe ilegal ini sejak sebulan lalu harus segera dimusnahkan. Jangan sampai barang ini keluar dari Karantina Pertanian yang justru sangat membahayakan keselamatan masyarakat.

"Coba Pak Sekjen, tolong diperhatikan itu. Saya sudah dua kali ngomong loh. Ini yang

sudah ketiga kalinya. Kalau tiga kalinya tidak dilaksanakan saya akan laporkan ke pihak yang berwenang," warning Sudin.

Sudin juga sudah meminta Kementerian Pertanian segera membuat surat ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar tidak serampangan mengeluarkan izin impor pangan.

"Jadi kalau (impor) jahe, ya jahe saja. Jahe yang bersih. Jangan ada tanahnya. Yang saya takutkan besok kalau impor jagung, jagungnya pakai bonggol," kata Sudin.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo. Dia bersepakat jahe campur tanah yang kini tertahan di Badan Karantina Pertanian harus segera dimusnahkan atau segera dikembalikan ke negara asal.

Sebab, dalam Undang-Undang Pangan sudah jelas menjamin higienis dan kualitas mutu pangan termasuk dari importasi pangan.

"Kalau ada impor yang memang komoditinya itu tidak terjamin kualitasnya, artinya melanggar undang-undang. Ada konsekuensi hukum dan ada sanksi pidana. Kalau memang ini terjadi kita harus berani ambil sikap melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan," tegas Firman.

Sementara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan

semua kontainer jahe ilegal tersebut masih *stand by* di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Syahrul menjamin akan langsung memimpin upaya pemusnahan jahe tersebut.

"Hanya saja ini membutuhkan biaya pemusnahan. Biasanya dikembalikan ke importir yang

melakukan itu. Tapi sampai saat ini janji melakukan itu," katanya.

Berdasarkan aturan, importir diberi kesempatan untuk melakukan pemusnahan sendiri atau kembalikan ke negara asal. Apalagi jahe yang ada di dua pelabuhan tersebut jumlahnya sangat besar.

Dia mengakui memang banyak rayuan kepada Kementan agar bisa loloskan jahe tersebut.

"Banyak gempuran untuk meloloskan itu. Demi Allah. Dan memang seperti itu yang ada. Dan memang tidak gampang untuk terus katakan tidak," tambah Syahrul. ■ KAL



ANTARA FOTO/APRILIO AKBAR/RA

SERAHKAN DIM RUU PRAKTIK PSIKOLOGI: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kedua kiri) didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Praktik Psikologi kepada Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (kanan) dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat membahas terkait penjelasan Ketua Komisi X DPR dan pandangan pemerintah terhadap RUU tentang Praktik Psikologi.